



Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Pantai Tanjung Siambang Kota Tanjungpinang

Aurellia Tiffani Putri¹⁾ Annisa Arrum²⁾ Kinanti Anjani Putri³⁾

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, Indonesia

¹Korespondensi Penulis. E-mail: annisaarrum03@gmail.com

Abstrak: Tanjungpinang merupakan salah satu Kota di Kepulauan Riau dengan potensi wisata alam yang menjanjikan, salah satu objek wisata di Tanjungpinang adalah Pantai Tanjung Siambang. Penelitian ini membahas bagaimana arah kebijakan pemerintah terhadap pembangunan destinasi wisata Pantai Tanjung Siambang. Jika dilihat dari kondisinya, sudah lima tahun terakhir Pantai Tanjung Siambang luput dari perhatian pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan pariwisata di Pantai Tanjung Siambang. Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh melalui informan dan juga hasil analisis peneliti dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan pemerintah terhadap pembangunan pariwisata Pantai Tanjung Siambang di Kota Tanjungpinang belum berjalan dengan maksimal. Temuan ini menunjukkan bahwa fokus pengembangan sarana transportasi, fasilitas umum, dan akses jalan merupakan langkah yang efektif dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya terus memperhatikan dan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi, fasilitas umum, serta akses jalan agar destinasi pariwisata ini dapat berkembang secara optimal dan menarik minat wisatawan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan; Pembangunan; Pariwisata

Abstract: Tanjungpinang is one of the cities in the Riau Islands with promising natural tourism potential. One of them is Tanjung Siambang Beach. This research discusses the direction of government policy toward developing the Tanjung Siambang Beach tourist destination. Judging from its condition, Tanjung Siambang Beach has escaped the government's attention for the last five years. This research used a qualitative approach by collecting data through interviews. This research provides an important contribution to understanding government policies in tourism development at Tanjung Siambang Beach. Based on field research obtained through informants and analysis, government policies regarding Tanjung Siambang Beach's tourism development in Tanjungpinang City have not been running optimally. These findings showed that focusing on developing transportation facilities, public facilities, and road access was an effective step in encouraging the growth of the tourism sector and could increase regional income. This research should continue to pay attention to and improve transportation facilities and infrastructure, public facilities, and road access so that this tourism destination can develop optimally and attract tourist interest sustainably.

Keywords: Policy; Development; Tourist

Article History:

Received : 2023-09-20

Revised : 2023-11-04

Accepted : 2023-11-08

PENDAHULUAN

Pariwisata adalah sebuah industri yang perkembangannya cukup pesat setiap tahunnya, saat ini banyak ditemukan daerah-daerah di Indonesia yang ingin mengubah sebagai daerah tujuan bagi para wisatawan atau pelancong. Pariwisata menjadi salah satu komoditi terbarukan

yang bisa dikelola oleh siapa saja tanpa memandang golongan sosial (Ridwan, 2012). Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki wisata bahari. Dengan banyaknya jumlah pulau di Kepulauan Riau yang berjumlah sekitar dua ribu lebih menandakan bahwa potensi wisata bahari yang dimiliki Kepulauan Riau besar.

Untuk memajukan pariwisata, dibutuhkan pembangunan yang optimal. Maka dari itu pembangunan pariwisata merupakan salah satu aspek penting dalam kemajuan pariwisata di Kepulauan Riau. Pembangunan pariwisata di Indonesia mencakup empat pilar pembangunan kepariwisataan yaitu destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Adapun strategi umum dalam pembangunan pariwisata meliputi penyesuaian sarana dan prasarana, penataan, dan pengembangan. Selain strategi, terdapat prinsip dalam pembangunan pariwisata di antaranya prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dari pariwisata tersebut, prinsip partisipasi masyarakat atau *community based tourism development*, prinsip terhadap daya dukung lingkungan pariwisata (*environmental carrying capacity*) agar ekspansi pariwisata di Indonesia tetap dijaga kelestariannya.

Kepulauan Riau adalah provinsi di Indonesia yang terkenal karena menjadi destinasi wisata yang kaya dengan keindahan pantai-pantainya. Dengan banyaknya pulau-pulau yang membentang, Kepulauan Riau menawarkan sejumlah pantai yang memikat dengan pasir putih lembut, air laut yang jernih, dan panorama alam yang memukau. Dengan potensi pantai di Kepulauan Riau menjadikan pantai sebagai objek wisata utama bagi masyarakat. Salah satu pantai di Tanjungpinang yang perlu mendapatkan perhatian terutama disektor pembangunan pariwisata oleh pemerintah adalah Pantai Tanjung Siambang. Pantai Tanjung Siambang ini berada di kawasan Pulau Dompok. Berdasarkan fakta lapangan kondisi Pantai Tanjung Siambang masih perlu diadakan pembaruan pembangunan pariwisata untuk menarik minat wisatawan.

Dalam hal pembangunan pariwisata pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Perda Kota Tanjungpinang No. 08 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Tanjungpinang Tahun 2020-2023. Dalam perda tersebut pasal 19, menjelaskan bahwa Pantai Tanjung Siambang merupakan daya tarik wisata pada destinasi pariwisata alam. Daya tarik adalah segala sesuatu yang mempunyai keunikan, keindahan, dan nilai yang beraneka ragam kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan wisatawan. Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas pariwisata tertuang dalam pasal 23-30. Dengan demikian, penulis tertarik untuk menemukan jawaban atas pertanyaan **“Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembangunan Pariwisata Pantai Tanjung Siambang Di Kota Tanjungpinang?”** dari studi kasus: pembangunan aksesibilitas Pariwisata Pantai Tanjung Siambang.

Tujuan dari penelitian ini selain untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan rumusan masalah secara garis besar, tetapi juga untuk mengumpulkan data terkait kesesuaian antara implementasi dan kebijakan pembangunan pariwisata yang dikeluarkan pemerintah Kota Tanjungpinang. Penelitian ini juga ingin melihat apakah kebijakan pemerintah terhadap pembangunan pariwisata Pantai Tanjung Siambang Kota Tanjungpinang telah terimplementasi. Selain itu penulis juga ingin mengetahui tentang kemajuan pembangunan di pantai tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini lebih mengutamakan penggunaan metode yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian yang dilakukan. Agar memperoleh data yang lebih spesifik dan relevan untuk dibahas lebih lanjut. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai “Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembangunan Pantai Tanjung Siambang”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode

pendekatan kualitatif. Yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, teknik pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam bentuk tanya jawab oleh narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, observasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan turun lapangan. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati yang kemudian dikumpulkan dalam catatan atau alat rekam.

HASIL PEMBAHASAN

Tanjung Siambang adalah salah satu pantai yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Kota Tanjungpinang di Pulau Dompok. Nama lain dari Pantai Tanjung Siambang adalah Pantai Sri Arjana. Pantai yang indah dan terawat tentunya akan membuat banyak wisatawan yang berkunjung.

Tingkat perencanaan pariwisata dijelaskan oleh Charles Kaiser Jr. Dan Larry E. Helber dalam bukunya, dimulai dengan pertumbuhan pariwisata daerah, yang meliputi pengembangan fisik objek dan atraksi. Setelah hal itu, dapat diamati bagaimana pertumbuhan jumlah wisatawan yang datang, jika memenuhi target yang telah ditentukan langkah selanjutnya memikirkan sistem prioritas. Pendekatan dengan organisasi pariwisata saat ini (umum dan komersial) dan pihak terkait diperlukan untuk pengembangan ini guna mendapatkan dukungan mereka untuk pertumbuhan pariwisata daerah yang sedang berlangsung. Pemerintah daerah memiliki kesempatan yang sangat baik untuk menyesuaikan pengembangan suatu daerah dengan potensi dan karakteristik khasnya. Hal ini menjadi peluang penting bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam menjalankan kewenangan yang melekat pada daerah tersebut. Kemajuan suatu daerah sangat bergantung pada kemampuan dan keinginan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas tersebut. Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk berinovasi dan mengekspresikan diri dalam upaya membangun daerahnya, dengan tetap mematuhi peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan, yaitu (1) menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, dan juga keamanan serta keselamatan wisatawan; (2) mewujudkan iklim yang mendukung untuk perkembangan usaha pariwisata yang mencakup terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, menyediakan fasilitas dan kepastian hukum; (3) memelihara, mengembangkan, dan juga melestarikan aset nasional sebagai daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergalai; (4) mengamati dan mengendalikan aktivitas kepariwisataan untuk mencegah dan menganggulangi beragam dampak negatif bagi masyarakat.

Menurut Grindle (1980:11) keberhasilan dari implementasi kebijakan dapat diukur dari dua hal:

- a. Dilihat dari prosesnya. Terkait persoalan apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang diagendakan yang merujuk pada aksi kebijakannya.
- b. Dilihat dari tercapainya tujuan kebijakan. Hal ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu dampak terhadap masyarakat secara individu maupun kelompok, tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan transformasi yang terjadi.

Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan pembangunan pariwisata Pantai Tanjung Siambang perlu segera dilakukan. Dalam Perda Nomor 8 Tahun 2021 tepatnya pada pasal 23 tentang Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata. Banyak implementasi yang belum tercapai dengan sempurna. Jika dilihat dari kondisi Pantai Tanjung Siambang, saat ini masih banyak hal yang perlu dibenahi, seperti penyediaan sarana dan prasarana transportasi, fasilitas umum, dan akses jalan.

Sarana Prasarana Transportasi

Sarana dan prasarana adalah salah satu bagian penting dari kegiatan pembangunan, adanya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan akan bermanfaat terhadap kegiatan pembangunan tersebut. Pada umumnya, tidak semua pantai menyediakan akses transportasi menuju sebuah pulau. Di Pantai Tanjung Siambang terdapat jembatan penyeberangan menuju Pulau Pangkil. Namun, jika dilihat kondisi jembatan tersebut hampir roboh dikarenakan arus ombak laut. Berdasarkan wawancara terhadap salah satu pengelola pantai, beliau mengatakan bahwa sejak lima tahun terakhir jembatan tersebut luput dari perhatian pemerintah.

Fasilitas Umum

Tidak jauh berbeda dengan sarana dan prasarana transportasi yang terdapat di Pantai Tanjung Siambang, ketersediaan fasilitas umum masih belum sepenuhnya memadai meskipun terdapat beberapa sarana yang tersedia namun kualitas dan jumlahnya masih terbatas, seperti gazebo, tempat parkir, tempat sampah, dan sarana bermain.

Akses Jalan

Jalan menuju pantai sering kali dalam kondisi rusak, berlubang, atau tidak terawat dengan baik, sehingga sulit bagi pengunjung untuk mencapai tujuan mereka dengan nyaman, selain itu kondisi jalan yang buruk dapat memperlambat laju kendaraan dan memperpanjang waktu perjalanan, padahal akses jalan merupakan aspek utama bagi wisatawan untuk berkunjung ke pantai tersebut. Terlebih lagi jika kondisi setelah hujan, kondisi jalan yang masih tanah atau tidak beraspal membuatnya menjadi licin dan banyak genangan air.

Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap Pantai Tanjung Siambang dinilai kurang sesuai dengan fakta di lapangan, karena terdapat kesenjangan antara kebijakan dan implementasi yang terlibat dalam Perda No. 8 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Tanjungpinang disebutkan bahwa pembangunan aksesibilitas pariwisata meliputi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi pembangunan ini bertujuan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan. Arah kebijakan yang dimaksud yaitu meliputi peningkatan dan pengembangan penyediaan sarana transportasi terutama untuk meningkatkan kemudahan akses, kenyamanan dan keamanan, pengembangan sistem transportasi. Serta akses moda transportasi untuk memudahkan pergerakan wisatawan.

Pemerintah juga menjanjikan pembangunan fasilitas umum dan akses jalan yang memadai, melakukan peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana umum, strategi yang dikeluarkan dengan cara melakukan pembangunan pariwisata baru, pengembangan kualitas pariwisata yang sudah ada, peningkatan kapasitas prasarana, dan melakukan pemeliharaan rutin. Pembangunan aksesibilitas dan fasilitas umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.

Proses pengembangan pariwisata harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang memiliki kaitan dengan industri pariwisata. Pendekatan ini memungkinkan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata, sehingga berdampak positif bagi kehidupan sosial mereka dan pembagian keuntungan dari aktivitas pariwisata. Partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan faktor pendukung yang kuat dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kampung Tanjung Siambang. Meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi seperti sumber daya manusia dan manajemen destinasi pariwisata yang masih perlu ditingkatkan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, pendekatan partisipatif tetap menjadi

kekuatan utama dalam pengembangan pariwisata di wilayah tersebut.

Partisipasi masyarakat menjadi kekuatan utama dalam pengembangan pariwisata, meskipun terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti sumber daya manusia yang terbatas dan manajemen destinasi pariwisata yang perlu diperbaiki. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan masih rendah, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkannya. Meskipun menghadapi kendala-kendala tersebut, pendekatan partisipatif dalam pengembangan pariwisata di Kampung Tanjung Siambang memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk merasakan manfaat ekonomi dan sosial dari pariwisata. Dengan memperhatikan masyarakat dalam proses pembangunan, pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.

Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan mengatasi kendala-kendala yang ada. Upaya meningkatkan sumber daya manusia, memperbaiki manajemen destinasi pariwisata, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan harus dilakukan agar pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kampung Tanjung Siambang dapat berhasil dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

SIMPULAN DAN SARAN

Tanjungpinang merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, maka tidak heran jika Tanjungpinang memiliki banyak pantai yang indah, salah satunya Pantai Tanjung Siambang. Pembangunan pariwisata adalah kerangka yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menggali dan juga mengembangkan industri pariwisata yang mempunyai daya tarik bagi para wisatawan. Pembangunan pariwisata merupakan salah satu aspek penting untuk membuat fasilitas yang terdapat di pantai agar tetap terjaga. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah Kota Tanjungpinang dalam pembangunan pariwisata Pantai Tanjung Siambang belum terlaksana dengan baik. Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembangunan pariwisata. Langkah-langkah pemeliharaan dan pengembangan yang berkelanjutan serta keterlibatan masyarakat setempat perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah dapat berjalan efektif dalam jangka panjang. Dengan demikian, Pantai Tanjung Siambang memiliki potensi yang lebih besar untuk terus menjadi destinasi pariwisata yang menarik dan berkelanjutan bagi wisatawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajriah, S. D., & Mussadun, M. (2014). Pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung pariwisata pantai yang berkelanjutan (studi kasus: kawasan pesisir pantai Wonokerto kabupaten Pekalongan). *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 10(2), 218–233. <https://doi.org/10.14710/pwk.v10i2.7653>
- Indraningsih, G. A. K. A. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA KOTA PALU. *Jurnal Pariwisata PaRAMA : Panorama, Recreation, Accomodation, Merchandise, Accessibility*, 1(1), 31–40. <https://doi.org/10.36417/jpp.v1i1.257>
- Jumardito, B., & Wulandari. (2022). Strategi Pemasaran Objek Wisata Bahari Pantai Tanjung Siambang oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 137–141. Retrieved from <http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/229>
- Kuswandi, A. (2020). Strategi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(2), 90–113. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817>

- Muawanah, U., Kurniasari, N., Soejarwo, P. A., & Yuliaty, C. (2020). Peran, Kepentingan Stakeholder dan Dukungan Kebijakan dalam Pengembangan Pariwisata Bahari Berbasis Budaya Bahari di Malaumkarta, Kabupaten Sorong. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 10(2), 157. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v10i2.8941>
- Munir, U., Dimiyati, K., & Absori, A. (2019). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Pulau Lombok. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.33319/yume.v4i2.13>
- Nadjmi, N., Prayitno, B., & Arsitektur, J. (n.d.). *Model Tata Ruang Destinasi Pariwisata Kepulauan di Kepulauan Riau*.
- Nugraha, Y. E. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten TTS: Studi Kasus Daya Tarik Wisata Pantai Oetune. *Media Wisata*, 19(1). <https://doi.org/10.36276/mws.v19i1.67>
- Pahlevi, R., & Jauhariyah, N. A. (2022). Analisis Peran Partisipasi Perempuan Secara Ekonomi dan Sosial di Pesisir Pantai Muncar Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 3(1), 104–120. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v3i1.1373>
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 08 Tahun 2021* (n.d.).
- Susilowati, M. H. D. (2017). Potensi Wilayah Sekitar Pantai Selatan Kabupaten Lebak Provinsi Banten dalam Mendukung Pembangunan Pariwisata. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 22(2), 105–112. <https://doi.org/10.17977/um017v22i22017p105>